

DAFTAR PUSTAKA

- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesia*, 66-66.
- Budihardjo, I. M. (2014). Panduan Praktis Menyusun SOP. Ras.
- DPMPTSP Kabupaten Banyumas Siap Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (2021). *Radarbanyumas.co.id*.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hidayat , F. (2018). Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi). *Thesis. Universitas Jember*.
- Hidayat, F., Sutomo, S., & Sunarko, B. S. (2018). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Pendelegasian Kewenangan Setengah Hati (Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi). *Politico*, 18(1).
- Investasi. (2020). *kbbi.web*. Retrieved from <https://kbbi.web.id/investasi>
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). *Jakarta: UI Press*.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 126-138.
- Negara, K. P. A., & Birokrasi, R. (2018). Mal Pelayanan Publik. *Diambil dari situs menpan. go. id*.

- Pontoh, G. M., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kegunaannya*, Jakarta: Grasindo.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rusnadiyah, Sumadinata, W. S., & Sari, D. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 105-123.
- Setiadi, A. (2015). Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi dan Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Setyawan, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 289-296.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel. *IPDN PRESS*.
- Sinaga, K. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. *Publik Reform*, 4.

Sopandi, A., & Nazmulmunir, N. (2012). Pengembangan iklim investasi daerah. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 10-24.

Suaramerdeka.com. 2021. "Pelayanan Terpadu Banyumas Memacu Laju Investasi Daerah". Diakses melalui : <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04422539/pelayanan-terpadu-banyumas-memacu-laju-investasi-daerah?page=all>

Waris, Irwan. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2).

Yunan, Z. Y. (2012). Investasi Swasta di Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2).

Zulfikar, M. R. (2017). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Banyumaskab.co.id. Profil Potensi Investasi. Diakses pada 2 Juni 2022, dari dpmptsp.banyumaskab.go.id/page/6735/profil-potensi-investasiBanyumaskab.go.id.

Sejarah-Dasar Hukum Pembentukan. Diakses pada 2 Juni 2022, dari dpmptsp.banyumaskab.go.id/page/1590/sejarah-dasar-hukum-pembentukan

Banyumaskab.go.id. Letak Geografis. Diakses pada 23 Mei 2022, dari banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis

Undang-Undang dan Peraturan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Banyumas (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031

Peraturan Menteri PAN & RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PAN&RB N0 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).